

**DETERMINAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK
DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
SEBAGAI MEDIASI**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh :

Erlangga Duto Guntur Prahananto

NIM. 31402400026

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

2025

DETERMINAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI MEDIASI

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

2025

SKRIPSI

DETERMINAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI MEDIASI

Disusun oleh :

Erlangga Duto Guntur Prahananto

NIM. 31402400026

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 20 Agustus 2025

Pembimbing,

Dr. Dista Amalia Arifah, S.E., M.Si., Akt.

NIK. 211406020

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

DETERMINAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI MEDIASI

Disusun oleh :

Erlangga Duto Guntur Prahananto

NIM. 31402400026

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan

selanjutnya dapat diajukan kepada Ketua Program Studi

S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Pada tanggal 20 Agustus 2025

Ketua Program Studi,



Pembimbing,

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK. 211403012

Dr. Dista Amalia Arifah, S.E., M.Si., Akt.
NIK. 211406020

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erlangga Duto Guntur Prahananto
NIM : 31402400026
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal Skripsi saya dengan judul :

“Determinan Kualitas Layanan Publik dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Mediasi”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat orisinal), bukan merupakan tiruan atau duplikat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 20 Mei 2025

Yang menyatakan,

Erlangga Duto Guntur Prahananto

NIM. 31402400026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas layanan publik yang terdapat pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berjenis *explanatory research* dengan analisis data yang dilakukan memanfaatkan teknik analisis regresi linear berganda dengan analisis jalur (*path analysis*). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018 – 2023. Data penelitian berasal dari 198 observasi dari 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018 – 2023 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan tindak lanjut rekomendasi audit berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit tidak mempengaruhi kualitas layanan publik, sedangkan kualitas laporan keuangan tidak dapat mempengaruhi hubungan antara temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas layanan publik, dan kualitas laporan keuangan juga tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan publik.

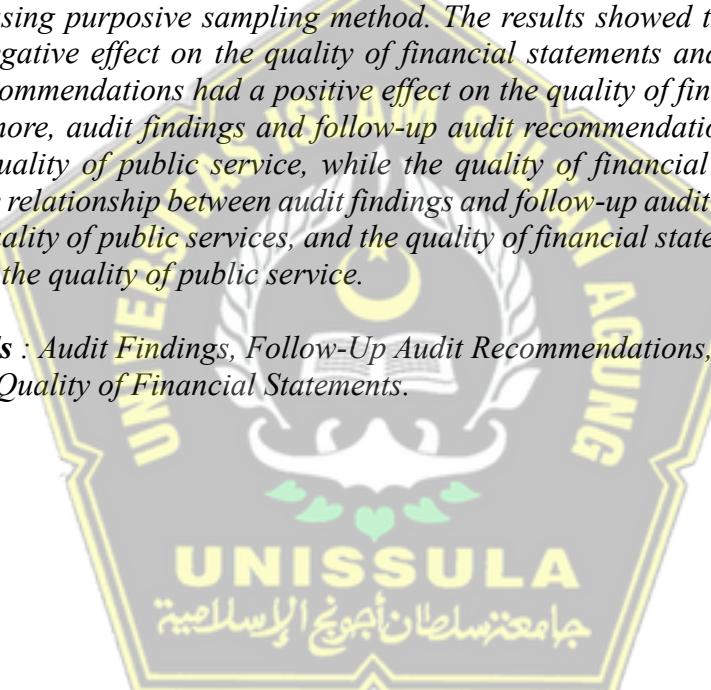
Kata Kunci : Temuan Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit, Kualitas Layanan Publik, Kualitas Laporan Keuangan.



ABSTRACT

This study aims to examine the effect of audit findings and follow-up recommendations on the quality of public service in Central Java Provincial Government with Quality of Financial Statements as an intervening variable. This study uses quantitative methods of explanatory research type with data analysis conducted using multiple linear regression analysis techniques with path analysis. This study uses secondary data in the form of Central Java Provincial Government Financial Report and Audit Report from Central Java Provincial Inspectorate for the period of 2018 – 2023. The research data came from 198 observations from 35 Regional Apparatus Organizations of Central Java Government in period of 2018 – 2023 using purposive sampling method. The results showed that audit findings had a negative effect on the quality of financial statements and the follow-up of audit recommendations had a positive effect on the quality of financial statements. Furthermore, audit findings and follow-up audit recommendations have no effect on the quality of public service, while the quality of financial statement cannot affect the relationship between audit findings and follow-up audit recommendations on the quality of public services, and the quality of financial statements also has no effect on the quality of public service.

Keywords : Audit Findings, Follow-Up Audit Recommendations, Quality of Public Service, Quality of Financial Statements.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal Skripsi dengan judul “**Determinan Kualitas Layanan Publik Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Mediasi**”.

Proposal Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selama proses bimbingan proposal skripsi peneliti mendapatkan motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., PhD., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Dista Amalia Arifah, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun proposal penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ja’far Shodiq, S.E., Ssi., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., selaku dosen reviewer proposal skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan penilaian dan review terhadap proposal penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang melalui kegiatan belajar

mengajar telah memberikan pengajaran bekal ilmu pengetahuan, wawasan dan dasar pemikiran yang lebih baik pada penulis.

6. Para staf administrasi dan seluruh staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah banyak membantu, mempermudah, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ir. Dyah Lukisari, M.Si., selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, yang telah memberikan izin dan mendukung penuh penulis dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Slamet Eko Prastiyo, S.P., M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan atasan penulis, yang telah mendukung, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Proposal Skripsi.
9. Seluruh Staf Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Proposal Skripsi.
10. Devi Ratnazhari, S.T.P., M.M., istri tercinta yang selalu setia menemani, mendukung, serta memberikan doa dan motivasi kepada penulis dalam menempuh proses pendidikan dengan baik dan penyelesaian Proposal Skripsi dengan lancar.

11. Sri Handoko, S.E., M.M., ayah dari penulis, Ir. Ririen Prabandari, ibunda dari penulis, Guruh Prahananto Katon Bagaskoro, S.M., kakak dari penulis, Prahananto Adi Jalu Pamungkas, S.Ant., adik dari penulis, yang selalu setia mendukung, memberikan doa dan perhatian yang tak kunjung berhenti kepada penulis sehingga menjadi semangat tersendiri bagi penulis dalam menempuh proses pendidikan dengan baik dan penyelesaian Proposal Skripsi dengan lancar.
12. Seluruh rekan mahasiswa RPL Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Angkatan Tahun 2024 khususnya untuk konsentrasi Program Studi Akuntansi yang menjadi teman seperjuangan penulis sejak awal perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang terlibat. Penulis berharap semoga Proposal Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 15 Juli 2025

Penulis,

Erlangga Duto Guntur Prahananto

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Teori Keagenan	10
2.1.2 Kualitas Layanan Publik.....	11
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	12

2.1.4 Temuan Audit.....	14
2.1.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	15
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	20
2.3.1 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20
2.3.2 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	22
2.3.3 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kualitas Layanan Publik	23
2.3.4 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kualitas Layanan Publik	24
2.3.5 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Hubungan Antara Temuan Audit Dan Kualitas Layanan Publik.....	27
2.3.6 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Hubungan Antara Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Dan Kualitas Layanan Publik	29
2.3.7 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Layanan Publik.....	30
2.4 Kerangka Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Populasi dan Sampel.....	33
3.2.1 Populasi	33
3.2.2 Sampel	34
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	36

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel.....	36
3.5.1 Variabel Dependen (Y)	37
3.5.2 Variabel Intervening (Z)	38
3.5.3 Variabel Independen (X).....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif.....	43
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	44
3.6.3 Model Regresi Linear Berganda	46
3.6.4 Uji Goodness of Fit Model	47
3.6.5 Uji Hipotesis	49
3.6.6 Analisis Jalur (Path Analysis).....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
4.2 Deskripsi Variabel.....	52
4.3 Analisis Data.....	56
4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik	56
4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda	60
4.3.3 Hasil Uji Godness of Fit Model.....	63
4.3.4 Hasil Uji Hipotesis.....	65
4.3.5 Analisis Jalur (Path Analysis).....	67
4.4 Pembahasan	69
4.4.1 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	69

4.4.2 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	71
4.4.3 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kualitas Layanan Publik	72
4.4.4 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kualitas Layanan Publik	74
4.4.5 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Hubungan Antara Temuan Audit dan Kualitas Layanan Publik	75
4.4.6 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Hubungan Antara Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Kualitas Layanan Publik	77
4.4.7 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Layanan Publik.....	78
BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Simpulan.....	80
5.2 Implikasi	83
5.3 Keterbatasan Penelitian	84
5.4 Agenda Penelitian Mendaratang.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Research Gap.....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3. 1 Kriteria Pemilihan Sampel	35
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel	41
Tabel 3. 3 Kriteria Pengujian Durbin Watson	45
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4. 2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	56
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	57
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi.....	59
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	61
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	63
Tabel 4. 9 Hasil Uji F	64
Tabel 4. 10 Hasil Uji t Variabel X ke Z	65
Tabel 4. 11 Hasil Uji t Variabel X dan Z ke Y	65
Tabel 4. 12 Hasil Perhitungan Sobel Test Moderasi Z terhadap X_1 dan Y	68
Tabel 4. 13 Hasil Perhitungan Sobel Test Moderasi Z terhadap X_2 dan Y	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian 32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peningkatan kualitas layanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah untuk terciptanya produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel (Rangkuti & Kurniawan, 2022). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan entitas atau organisasi pelayan publik yang berada pada wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga 13 kali (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024). Namun opini audit ini bukan tanpa kendala. Dalam hal ini, penerapan sistem akuntansi akrual yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas diharapkan dapat berdampak pada kualitas layanan publik. Namun yang terjadi, masyarakat masih cenderung ragu bahwa layanan yang diberikan dapat berjalan maksimal. Hal ini yang menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah (Firdausijah & Priatna, 2020).

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024, terdapat 126.289 aduan masyarakat yang dilaporkan melalui kanal LaporGub! sejak tahun 2014 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memenuhi harapan masyarakat Jawa Tengah. Layanan publik pada hakikatnya merupakan hal yang esensial bagi kinerja pemerintahan dan sejalan

dengan konsep manajemen publik yang baru. Semakin baik kualitas pelaporan keuangan, semakin tinggi pula kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi akuntansi sektor publik dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta merupakan keberhasilan penerapan manajemen publik yang baik (Nurohmayni Putri, 2024). Meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian telah berhasil dipertahankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga 13 kali, temuan dan implikasi audit yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ataupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus lebih diperhatikan. Temuan audit pada dasarnya mengungkap permasalahan dalam kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan, inefisiensi, inefektivitas, dan praktik pemerintah yang tidak ekonomis dalam mengelola anggaran (Nurfaidah & Novita, 2022). Hal ini ditegaskan (Furqan et al., 2020) bahwa sebagai auditor, APIP mengusulkan untuk mengevaluasi struktur pengendalian internal dan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan.

Tindak lanjut rekomendasi audit akan meningkatkan keberlanjutan pengelolaan keuangan organisasi sehingga diharapkan dapat mendorong kualitas layanan publik. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Furqan et al., 2020) dapat diasumsikan bahwa temuan audit menggambarkan sistem pengendalian internal yang lemah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan, yang menyebabkan kerugian

pemerintah dan tindakan kecurangan serta korupsi. Banyaknya temuan audit kemudian menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan dan layanan publik.

Penelitian sebelumnya mengenai temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan kualitas layanan publik dalam beberapa tahun terakhir banyak dilakukan peneliti sebelumnya dengan hasil yang beragam, seperti tersaji pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Research Gap

No.	Hubungan Variabel	Peneliti	Temuan
1	Temuan Audit terhadap Kualitas Layanan Publik	(Lestari & Rohman, 2022) (Furqan et al., 2020)	Temuan Audit tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas layanan publik Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Kualitas Layanan Publik
2	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Layanan Publik	(Lestari & Rohman, 2022) (Furqan et al., 2020)	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit tidak memiliki pengaruh langsung terhadap Kualitas Layanan Publik Tindak Lanjut Rekomendasi Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Layanan Publik
3	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Layanan Publik	(Sundari et al., 2023) (Furqan et al., 2020)	Kualitas Laporan Keuangan mempengaruhi Layanan Publik Kualitas Laporan Keuangan mempengaruhi Kualitas Layanan Publik
4	Temuan Audit terhadap Kualitas	(Pertiwi & Wibowo, 2023)	Temuan Audit berdampak negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

No.	Hubungan Variabel	Peneliti	Temuan
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	(Furqan et al., 2020)	Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
5	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	(Pertiwi & Wibowo, 2023) (Furqan et al., 2020)	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit tidak mempengaruhi Kualitas Laporan keuangan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : diolah penulis, 2025

(Lestari & Rohman, 2022) pada penelitiannya menyampaikan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas layanan publik. Namun (Furqan et al., 2020) pada penelitiannya menyampaikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas layanan publik. Selain itu, (Lestari & Rohman, 2022) juga menyampaikan dalam penelitiannya bahwa tindak lanjut rekomendasi audit tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas layanan publik. Namun (Furqan et al., 2020) menyampaikan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan pentingnya peran tindak lanjut rekomendasi audit dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, khususnya dalam pelayanan publik.

Kualitas laporan keuangan mempengaruhi kualitas layanan publik, seperti yang disampaikan (Furqan et al., 2020; Sundari et al., 2023). Selain itu, temuan audit berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan seperti yang disampaikan (Furqan et al., 2020; Pertiwi & Wibowo, 2023) pada penelitiannya.

Sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan menurut penelitian (Pertiwi & Wibowo, 2023), namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Furqan et al., 2020) disampaikan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena tindak lanjut rekomendasi audit dapat mereduksi temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki populasi dan sampel yang berbeda dibanding penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menggunakan populasi dan sampel Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipilih karena secara pengelolaan keuangan telah menerima dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* di atas, penelitian ini menarik untuk dilakukan dalam rangka menguji pengaruh variabel independen yaitu Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Layanan Publik dengan variabel intervening yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini juga sangat penting bagi peningkatan pemberian layanan kepada masyarakat, terutama masyarakat di Jawa Tengah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang dituangkan dalam penelitian berjudul “**DETERMINAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI MEDIASI**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan *research gap* yang dikemukakan di atas ditemukan masalah yaitu masih adanya inkonsistensi temuan hasil penelitian mengenai temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap peningkatan kualitas layanan publik dimana pada satu sisi temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit merupakan indikator penting dalam penentuan kualitas layanan publik namun di sisi lain ditemukan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit bukan merupakan penentu kualitas layanan publik. Penelitian ini juga mencoba menempatkan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel intervening dengan harapan dapat menjembatani hubungan temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit dengan kualitas layanan publik. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Layanan Publik melalui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Apakah Temuan Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Tindak Lanjut Rekomendasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

3. Apakah Temuan Audit berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Publik?
4. Apakah Tindak Lanjut Rekomendasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Publik?
5. Apakah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memediasi hubungan antara Temuan Audit dan Kualitas Layanan Publik?
6. Apakah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memediasi hubungan antara Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Kualitas Layanan Publik?
7. Apakah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Publik?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Temuan Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Temuan Audit terhadap Kualitas Layanan Publik.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Layanan Publik.

5. Menguji dan menganalisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam memediasi hubungan antara Temuan Audit dan Kualitas Layanan Publik.
6. Menguji dan menganalisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam memediasi hubungan antara Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Kualitas Layanan Publik.
7. Menguji dan menganalisis pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Layanan Publik.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut.

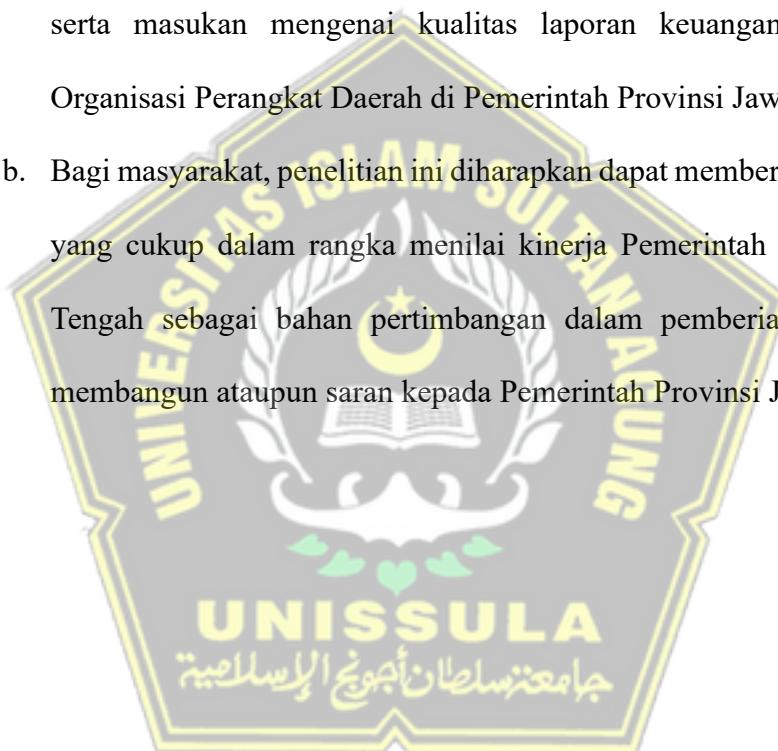
1. Manfaat Teoritis

Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Layanan Publik serta pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam memediasi Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Layanan Publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Layanan Publik serta pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam memediasi Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Layanan Publik kepada civitas akademik yang akan

melakukan penelitian dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kualitas layanan publik yang diberikan serta masukan mengenai kualitas laporan keuangan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup dalam rangka menilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kritik yang membangun ataupun saran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya ikatan kontraktual antara agen dan prinsipal. Teori keagenan merupakan dasar pemahaman yang menjabarkan tentang hubungan kontrak antara pemilik sumber daya (*principal*) dengan pengurus penggunaannya (*agent*). Teori keagenan umumnya digunakan di administrasi publik dalam menganalisis persoalan yang berkaitan dengan manajemen serta administrasi di suatu negara berdasarkan konsep desentralisasi, secara tradisional digunakan untuk memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Lestari & Rohman, 2022). Hal ini dapat menggambarkan hubungan antara rakyat sebagai prinsipal dengan pemerintah sebagai agen di mana terdapat kontrak yang ditetapkan rakyat yang menggunakan pemerintah sebagai agen untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat atau masyarakat.

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *Agency Theory*. Diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Pertiwi & Wibowo, 2023). Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat (prinsipal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan

masyarakat. Teori keagenan menjelaskan bahwa *agency problem* terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen (Margaret & Daljono, 2023). Perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan banyak terjadinya *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balance* agar dapat mengurangi *information asymmetry*. Peningkatan akuntabilitas kinerja tersebut dapat dilakukan dengan cara menyiapkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi berkualitas dan memenuhi unsur-unsur kriteria yang ditetapkan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan dapat memberikan informasi bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan baik sehingga kemungkinan terjadinya korupsi menjadi sangat kecil (Pertiwi & Wibowo, 2023).

2.1.2 Kualitas Layanan Publik

Layanan publik dapat diartikan sebagai pemberian jasa yang dilakukan oleh entitas yang menyediakan serta bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat (Rangkuti & Kurniawan, 2022). Menurut Ibrahim dalam (Rangkuti & Kurniawan, 2022), kualitas layanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan di mana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya

pemberian layanan publik tersebut. Seiring dengan perkembangan globalisasi, masyarakat menjadi lebih responsif dan kritis terhadap segala bentuk hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Namun dalam pelaksanaan layanan publik, tidak sedikit warga masyarakat yang mengalami kendala dan mengeluhkan perilaku atau respons yang diberikan aparat atau perangkat daerah dalam memberikan layanan (Cendana & Oktariyanda, 2022). Fungsi pelayanan publik adalah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara publik (Cendana & Oktariyanda, 2022).

Tujuan adanya pelayanan publik antara lain (1) terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas berkaitan dengan hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik, (2) terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak dan sesuai dengan asas hukum pemerintahan yang baik, dan (3) terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Cendana & Oktariyanda, 2022).

Zeithaml dalam (Rangkuti & Kurniawan, 2022) menjelaskan kualitas layanan publik dapat diukur dari 5 (lima) dimensi, yaitu *tangibel* (berwujud), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (ketanggapan), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati).

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum laporan keuangan diketahui sebagai suatu hasil proses pencatatan keuangan, mencerminkan prestasi manajemen organisasi pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan hasil tanggung jawab para

penyusun laporan keuangan (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Laporan keuangan merupakan media informasi yang menggambarkan seluruh aktivitas organisasi. Hanaffi dalam (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021) menyampaikan bahwa laporan keuangan yang disusun merupakan hasil akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilakukan sebelumnya: tahap identifikasi dokumen, tahap entri jurnal dan periode akuntansi untuk setiap akun. Tujuan mendasar dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan (Andriyani et al., 2020).

Kualitas laporan keuangan menunjukkan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan (Dewi & Purwanto, 2022). Tujuan mendasar dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan (Andriyani et al., 2020). Halim dalam (Dewi & Purwanto, 2022) menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan berbagai informasi yang berhubungan dengan keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas. Laporan keuangan dapat berkualitas karena adanya sistem akuntansi yang berjalan dengan baik.

Secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan ciri kualitatif dari proses akuntansi, di mana akuntabilitas dan transparansi saling mempengaruhi, semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah, semakin besar akuntabilitas dan transparansi, begitu sebaliknya (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dapat dianggap memenuhi keinginan para pengguna atau pembaca laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah yang baik tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum, namun kualitas tata kelola yang baik tergantung pada faktor-faktor lain seperti daya tanggap, efektivitas kesetaraan berbasis konsensus, efisiensi dan visi strategis (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).

2.1.4 Temuan Audit

Temuan audit merupakan representasi dari hasil evaluasi auditor, baik auditor eksternal, yang dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan juga auditor internal atau APIP terhadap kondisi pengelolaan keuangan, struktur pengendalian internal, dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah (Furqan et al., 2020). Mengacu pada Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menunjukkan bahwa Temuan Audit dapat dijadikan bahan evaluasi auditor untuk melihat kualitas efisiensi dan efektivitas kewajaran pelaporan keuangan, struktur pengendalian internal, dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap pengaturan pelaporan keuangan negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Temuan audit menunjukkan sistem pengendalian internal organisasi tidak efektif, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan, serta pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang tidak efektif (Pertiwi & Wibowo, 2023). Selain itu, jumlah temuan audit yang disampaikan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kualitas pelayanan publik pada pemerintahan (Lestari & Rohman, 2022). Temuan audit merepresentasikan kelalaian pemerintah daerah terhadap standar akuntansi dan peraturan laporan

keuangan lainnya, sehingga ketika temuan audit tinggi, beberapa standar akuntansi tidak diikuti dan kondisi tersebut menyebabkan temuan audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (Furqan et al., 2020).

2.1.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 20 dijelaskan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selain itu, tindak lanjut rekomendasi audit merupakan langkah wajib yang dilakukan oleh audit internal dan segenap pejabat pemerintah daerah untuk memperbaiki kesalahan dan masalah yang ada pada akuntabilitas keuangan publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Tindak lanjut audit merupakan tahapan perbaikan yang dilakukan oleh pemimpin sesuai rekomendasi tindak lanjut atas temuan audit (Furqan et al., 2020). Tindak Lanjut Rekomendasi Audit yang dilakukan dengan baik merupakan bentuk dari pengendalian internal dalam perbaikan kesalahan dan masalah yang ada pada suatu entitas pemerintahan daerah (Lestari & Rohman, 2022).

Kualitas laporan keuangan dan kualitas layanan publik secara tidak langsung dapat diperbaiki melalui tindak lanjut rekomendasi audit (Furqan et al., 2020). Tindak Lanjut Rekomendasi Audit diukur dengan membandingkan presentasi rekomendasi audit yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan total rekomendasi audit yang diberikan oleh auditor (Furqan et al., 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian terdahulu mengenai Temuan Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Kualitas Layanan Publik dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Sampel dan Metode Analisis	Hasil
1	Puspa Kusuma Pertiwi & Puji Wibowo (2023)	Variabel Independen : - Temuan Audit - Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Variabel Dependend : - Kualitas Layanan Publik Variabel Intervening : - Kualitas Laporan Keuangan	Sampel : 34 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat Republik Indonesia pada periode 2015 – 2019 Metode Analisis : Regresi Cross-Sectional	Temuan audit berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan Tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas layanan publik
2	Andi Chairil Furqan, Ratna Wardhani, Dwi Martani, Dyah Setyaningrum (2020)	Variabel Independen : - Temuan Audit - Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Variabel Dependend : - Kualitas Layanan Publik	Sampel : 491 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 – 2016 Metode analisis : Regresi Cross-Sectional	Kualitas laporan keuangan mempengaruhi kualitas layanan publik Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas

No	Peneliti	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Sampel dan Metode Analisis	Hasil
3	Bambang Pamungka s, Cendy Avrian, & Reisyah Ibtida (2019)	<p>Variabel Intervening :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Laporan Keuangan <p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Daerah - Pendapatan Daerah - Belanja Modal - Tindak Lanjut Rekomendasi Audit <p>Variabel Dependental :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temuan Audit <p>Variabel Moderating :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelemahan Sistem Pengendalian Internal 	<p>Sampel :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2017 <p>Metode analisis :</p> <p><i>Generalized Least Square (GLS)</i></p>	<p>laporan keuangan dan kualitas layanan publik</p> <p>- Tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan kualitas layanan publik</p> <p>Temuan audit berpengaruh negatif terhadap Sistem Pengendalian Internal</p>
4	Bambang Pamungka s, Reisyah Ibtida, & Cendy Avrian (2018)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Pengendalian Internal - Ketidakpatuhan terhadap peraturan 	<p>Sampel :</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Pemerintah Kota di Indonesia pada Tahun 2015 – 2016 <p>Metode Analisis :</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit</p> <p>Ketidakpatuhan terhadap</p>

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Sampel dan Metode Analisis	Hasil
5	Wendy Budianto (2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opini Audit <p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opini - Temuan Audit - Gender 	<ul style="list-style-type: none"> Inferential Statistical Analysis dengan Ordinal Logistic Regression <p>Sampel : 1.082 sampel Kabupaten/Kota tahun 2008 – 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit - Opini audit berpengaruh terhadap skor kinerja - Temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja
6	Muhammad Din, Munawara h, Imam Ghozali, Tarmizi Achmad (2017)	<p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindak Lanjut Rekomendasi Audit <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas Laporan Keuangan <p>Variabel Intervening :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kerugian keuangan negara 	<p>Metode Analisis :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regresi Linear Berganda <p>Sampel : 1152 sampel kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2011 – 2014</p> <p>Metode analisis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Structural Equation Model (SEM) with Warp-PLS & Sobel Test Method</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif signifikan terhadap opini audit
7	Bambang Sutopo, Trinik Ratih Wulandari,	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-Government - Opini Audit 	<p>Sampel : 246 pemerintah daerah di Indonesia tahun 2012 – 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> Opini audit berpengaruh positif terhadap

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Sampel dan Metode Analisis	Hasil
	Arum Kusumani ngdyah Adiati, Dany Adi Saputra (2017)	Variabel Dependen : - Kinerja Pemerintah	Metode Analisis : Regresi Linear Berganda	kinerja pemerintah
8	Yayuk Harumiati & Payamta (2014)	Variabel Independen : - Karakteristik Pemerintah Daerah - Temuan Audit BPK	Sampel : 243 pemerintah daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2011	- Temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah
9	Januarti Tiurmaida, Etty Murwaningsari, Binsar Simanjuntak, & Sekar Mayangsa ri (2021)	Variabel Dependen : - Kinerja Pemerintah Daerah	Metode analisis : Regresi linear berganda	
10	Tania Angela, Marsellisa Nindito, & Hera	Variabel Independen : - Temuan Audit - Opini Audit - Tindak Lanjut Hasil Audit	Sampel : 74 dari 88 Kementerian/Lembaga di Indonesia pada tahun 2015-2019	- Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
		Variabel Dependen : - Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Metode Analisis : Technical Regression dengan STATA	- Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Sampel dan Metode Analisis	Hasil
	Khairunni sa (2023)	Variabel Dependen : - Tingkat Korupsi	Metode Analisis : Panel Data Regression Analysis dengan EVViews	
11	Cris Kuntadi, Didi Suryadi, & Galih Anggriaw an (2023)	Variabel Independen : - Opini Audit - Temuan Audit - Tindak Lanjut Hasil Audit Variabel Dependen : - Tingkat Korupsi	Sampel : 8 artikel jurnal Metode Analisis : Kualitatif dengan tinjauan pustaka	- Opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi - Temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi - Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi

Sumber : diolah penulis, 2025

2.3 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.3.1 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teori keagenan memandang perlunya pemerintah dalam menjalankan peran dan tugasnya untuk menjaga akuntabilitas kinerjanya untuk tetap memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Peningkatan akuntabilitas kinerja

tersebut dapat dilakukan dengan mempersiapkan laporan keuangan yang berkualitas yang dapat memberikan informasi dan memenuhi unsur-unsur kriteria yang ditetapkan. Dalam mengukur kualitas laporan keuangan, temuan audit merupakan unsur yang substansial. Jumlah temuan audit dapat dijadikan acuan dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Semakin sedikit temuan audit, semakin tinggi kualitas laporan keuangan entitas tersebut. Dengan demikian, laporan keuangan yang lebih baik seharusnya mengandung lebih sedikit masalah baik dalam jumlah temuan maupun dalam hal moneter (Pamungkas et al., 2019).

Temuan audit juga berasal dari perbandingan kriteria dan fakta (Angela et al., 2023). Lebih jauh, kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh temuan audit. Semakin banyak temuan yang terungkap, semakin kecil kemungkinan menghasilkan opini yang baik dan sebaliknya (Pamungkas et al., 2019). Opini ini umumnya dikaitkan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang berdampak pada keuangan (Nurfaidah & Novita, 2022). Jumlah temuan audit yang tinggi dapat diartikan bahwa secara langsung kualitas laporan keuangan entitas merupakan laporan keuangan yang tidak baik. Temuan audit merepresentasikan kelalaian pemerintah daerah terhadap standar akuntansi dan peraturan laporan keuangan lainnya, sehingga ketika temuan audit tinggi, beberapa standar akuntansi tidak diikuti dan kondisi tersebut menyebabkan temuan audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (Furqan et al., 2020).

Beberapa penelitian terdahulu memberikan dukungan empiris mengenai pengaruh temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,

pertama penelitian dari (Furqan et al., 2020) yang menyatakan bahwa temuan audit berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal yang sama disampaikan oleh (Pertiwi & Wibowo, 2023) bahwa temuan audit memiliki dampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.2 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tindak lanjut rekomendasi audit merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh auditor internal dan segenap pejabat pemerintah daerah untuk memperbaiki kesalahan dan masalah yang ada pada akuntabilitas keuangan publik. Tindak lanjut rekomendasi audit yang dilakukan dengan baik merupakan bentuk pengendalian internal dalam perbaikan kesalahan dan masalah yang ada pada entitas pemerintahan daerah. Teori keagenan memandang bahwa entitas pemerintah sebagai agen perlu melaksanakan perbaikan kesalahan dan masalah dalam rangka menjaga akuntabilitas dan menjaga kepercayaan prinsipal yang dalam hal ini adalah masyarakat. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai agen dapat dilaksanakan salah satunya adalah dengan menindaklanjuti adanya temuan audit dengan melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi audit yang diberikan oleh auditor.

Tindak lanjut rekomendasi audit secara tidak langsung dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan (Furqan et al., 2020). Tindak lanjut rekomendasi audit

menunjukkan bahwa upaya perbaikan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tindakan ini juga merupakan cerminan efektivitas pengawasan internal oleh auditor internal (Furqan et al., 2020). (Furqan et al., 2020) juga menyampaikan hubungan positif antara tindak lanjut rekomendasi audit dengan kualitas laporan keuangan. (Pertiwi & Wibowo, 2023) menegaskan bahwa tindakan korektif terhadap hasil audit kemungkinan akan mempengaruhi opini audit.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan dukungan empiris mengenai pengaruh tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pertama penelitian dari (Pertiwi & Wibowo, 2023) yang menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun menurut (Furqan et al., 2020) disampaikan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Tindak Lanjut Rekomendasi Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.3 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kualitas Layanan Publik

Secara konseptual, mewujudkan kualitas layanan publik akan sangat dipengaruhi oleh efektivitas dan tingkat akuntabilitas dalam memberikan layanan publik (Furqan et al., 2020). Semakin banyak temuan audit, maka opini audit yang diberikan akan semakin rendah, sehingga mempengaruhi kualitas layanan publik. Jumlah temuan audit dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan. Jumlah temuan audit memiliki hubungan

yang berkorelasi negatif terhadap kualitas layanan publik yang dihasilkan. Jumlah temuan audit yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa kualitas layanan publik yang diberikan menjadi rendah.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan publik salah satunya dengan cara meningkatkan efektivitas dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Temuan audit juga berasal dari perbandingan kriteria dan fakta (Angela et al., 2023). Semakin banyak temuan yang terungkap, semakin kecil kemungkinan menghasilkan opini yang baik dan sebaliknya (Pamungkas et al., 2019).

Beberapa penelitian terdahulu memberikan dukungan empiris mengenai pengaruh temuan audit terhadap kualitas layanan publik, pertama penelitian dari (Lestari & Rohman, 2022) yang menyampaikan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas layanan publik. Sedangkan (Furqan et al., 2020) pada penelitiannya menyampaikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas layanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃ : Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Kualitas Layanan Publik

2.3.4 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kualitas Layanan Publik

Tindak lanjut rekomendasi audit yang dilakukan dengan baik merupakan bentuk pengendalian internal dalam perbaikan kesalahan dan masalah yang ada pada entitas pemerintahan daerah. Dengan kata lain, penerapan rekomendasi audit

dapat memperbaiki kelemahan organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Hasil tersebut menggambarkan bahwa ketika pemerintah melaksanakan rekomendasi hasil audit dari auditor, maka kinerja pemerintah akan meningkat. Dengan demikian, perbaikan pengelolaan keuangan negara akan memberikan perbaikan terhadap layanan publik.

Teori keagenan memandang bahwa entitas pemerintah sebagai agen perlu melaksanakan perbaikan kesalahan dan masalah dalam rangka menjaga akuntabilitas dan menjaga kepercayaan prinsipal yang dalam hal ini adalah masyarakat. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai agen dapat dilaksanakan salah satunya adalah dengan menindaklanjuti adanya temuan audit dengan melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi audit yang diberikan oleh auditor. Tindakan ini juga merupakan cerminan efektivitas pengawasan internal oleh auditor internal (Furqan et al., 2020). (Pertiwi & Wibowo, 2023) menegaskan bahwa tindakan korektif terhadap hasil audit kemungkinan akan mempengaruhi opini audit.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan dukungan empiris mengenai pengaruh tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas layanan publik, pertama penelitian dari (Lestari & Rohman, 2022) menyampaikan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas layanan publik, namun diungkapkan juga bahwa semakin tinggi tindak lanjut rekomendasi audit, maka kinerja pemerintah daerah akan semakin tinggi. Sebaliknya, (Furqan et al., 2020) menyampaikan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan pentingnya peran

tindak lanjut rekomendasi audit dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah terutama dalam hal pelayanan publik.



Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₄ : Tindak Lanjut Rekomendasi Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Layanan Publik

2.3.5 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Hubungan Antara Temuan Audit Dan Kualitas Layanan Publik

Kualitas laporan keuangan dapat memperkuat hubungan temuan audit terhadap kualitas layanan publik (Furqan et al., 2020). Pengukuran terhadap kualitas laporan keuangan, temuan audit merupakan unsur yang substansial. Semakin banyak temuan audit, maka opini audit yang diberikan akan semakin rendah, sehingga mempengaruhi kualitas layanan publik (Pertiwi & Wibowo, 2023). Jumlah temuan audit dapat dijadikan acuan dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Semakin sedikit temuan audit, semakin tinggi kualitas laporan keuangan entitas tersebut. Dengan demikian, laporan keuangan yang lebih baik seharusnya mengandung lebih sedikit masalah baik dalam jumlah temuan maupun dalam hal moneter (Pamungkas et al., 2019).

Lebih jauh, kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh temuan audit. Semakin banyak temuan yang terungkap, semakin kecil kemungkinan menghasilkan opini yang baik dan sebaliknya (Pamungkas et al., 2019). Opini ini umumnya dikaitkan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang berdampak pada keuangan (Nurfaidah & Novita, 2022). Jumlah temuan audit yang tinggi dapat diartikan bahwa secara langsung kualitas laporan keuangan entitas merupakan laporan keuangan yang tidak baik.

Temuan audit merepresentasikan kelalaian pemerintah daerah terhadap standar akuntansi dan peraturan laporan keuangan lainnya, sehingga ketika temuan audit tinggi, beberapa standar akuntansi tidak diikuti dan kondisi tersebut menyebabkan temuan audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (Furqan et al., 2020).

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan publik salah satunya dengan cara meningkatkan efektivitas dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Temuan audit juga berasal dari perbandingan kriteria dan fakta (Angela et al., 2023). Semakin banyak temuan yang terungkap, semakin kecil kemungkinan menghasilkan opini yang baik dan sebaliknya (Pamungkas et al., 2019).

Beberapa penelitian terdahulu memberikan dukungan empiris mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap hubungan antara temuan audit dan kualitas layanan publik, pertama penelitian dari (Furqan et al., 2020) menyampaikan bahwa hasil temuan audit berdampak negatif terhadap kualitas layanan publik dan kinerja laporan keuangan. Selain itu kualitas laporan keuangan dapat memperkuat hubungan temuan audit terhadap kualitas layanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₅ : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memengaruhi hubungan antara Temuan Audit dan Kualitas Layanan Publik

2.3.6 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Hubungan Antara Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Dan Kualitas Layanan Publik

Tindak Lanjut Rekomendasi Audit yang dilakukan dengan baik merupakan bentuk dari pengendalian internal dalam perbaikan kesalahan dan masalah yang ada pada suatu entitas pemerintahan daerah (Lestari & Rohman, 2022). Hasil tersebut menggambarkan bahwa ketika pemerintah melaksanakan rekomendasi hasil audit dari auditor, maka kinerja pemerintah akan meningkat. Dengan demikian, perbaikan pengelolaan keuangan negara akan memberikan perbaikan terhadap layanan publik. Tindak lanjut rekomendasi audit merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh auditor internal dan segenap pejabat pemerintah daerah untuk memperbaiki kesalahan dan masalah yang ada pada akuntabilitas keuangan publik.

Teori keagenan memandang bahwa entitas pemerintah sebagai agen perlu melaksanakan perbaikan kesalahan dan masalah dalam rangka menjaga akuntabilitas dan menjaga kepercayaan prinsipal yang dalam hal ini adalah masyarakat. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai agen dapat dilaksanakan salah satunya adalah dengan menindaklanjuti adanya temuan audit dengan melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi audit yang diberikan oleh auditor. Tindak lanjut rekomendasi audit menunjukkan bahwa upaya perbaikan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tindakan ini juga merupakan cerminan efektivitas pengawasan internal oleh auditor internal (Furqan et al., 2020). (Pertiwi & Wibowo, 2023) menegaskan bahwa tindakan korektif terhadap hasil audit kemungkinan akan mempengaruhi opini audit.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan dukungan empiris mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap hubungan antara tindak lanjut rekomendasi audit dan kualitas layanan publik, pertama penelitian dari (Pertiwi & Wibowo, 2023) menyampaikan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun berpengaruh positif terhadap kualitas layanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₆ : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memengaruhi hubungan antara Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Kualitas Layanan Publik

2.3.7 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Layanan Publik

Kualitas laporan keuangan menandakan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah (agen). Upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dapat mempercepat organisasi untuk mengambil tindakan guna meningkatkan efektivitas kinerjanya. (Furqan et al., 2020; Pertiwi & Wibowo, 2023) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan mempengaruhi kualitas layanan publik secara signifikan.

Teori pemangku kepentingan memandang bahwa manfaat yang diberikan oleh pemerintah perlu disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Pemberian manfaat tersebut dapat berupa pelayanan publik yang memiliki kualitas yang baik. Selain itu, pada teori keagenan,

dapat disampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, yang salah satu caranya adalah dengan memberikan informasi keuangan yang berkualitas melalui penyampaian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

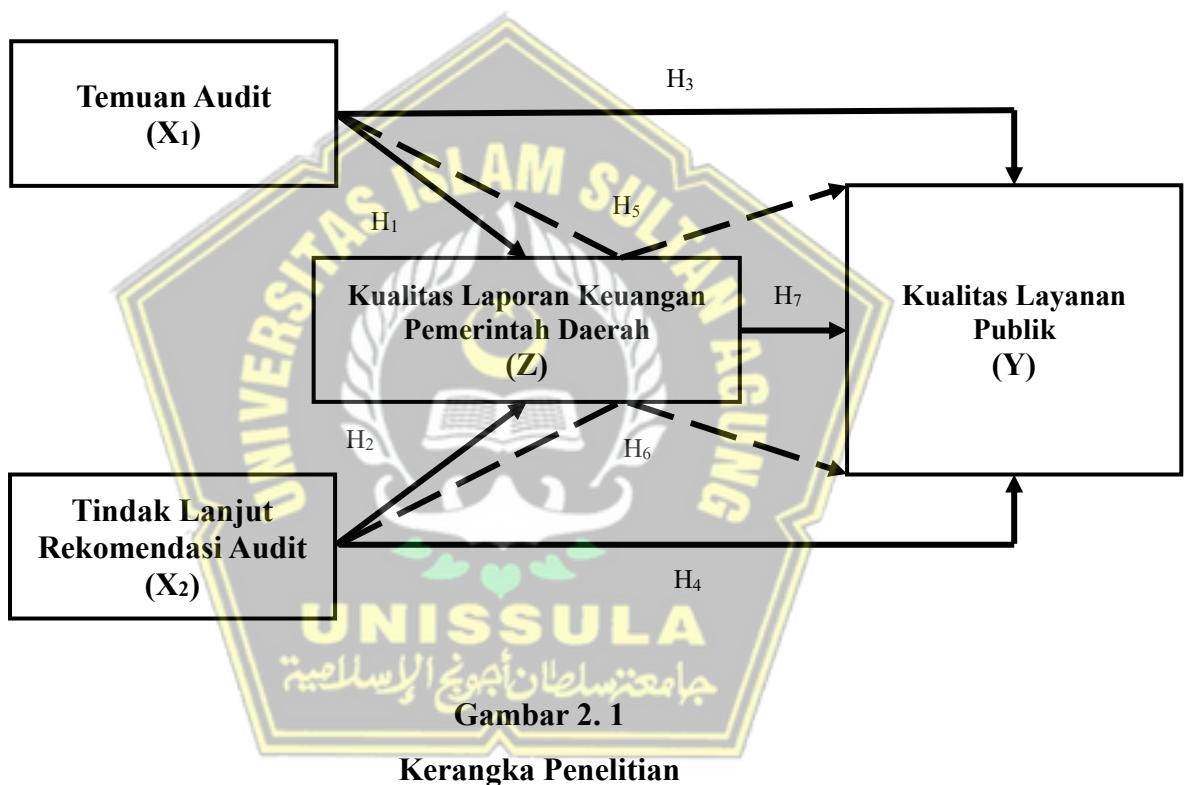
Beberapa penelitian terdahulu memberikan dukungan empiris mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas layanan publik, pertama penelitian dari (Sundari et al., 2023) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan mempengaruhi kualitas layanan publik. Hal yang sama juga disampaikan oleh (Furqan et al., 2020) bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga memiliki pengaruh positif terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₇ : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Layanan Publik

2.4 Kerangka Penelitian

Model kerangka penelitian menempatkan Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit sebagai variabel independen, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel intervening, serta Kualitas Layanan Publik sebagai variabel dependen. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. (Sugiyono, 2022) menyampaikan bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan filsafat positivisme sebagai dasar dalam penelitian guna meneliti populasi atau sampel tertentu dengan proses pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk melaksanakan pengujian hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian berjenis *explanatory research*. *Explanatory research* merupakan penelitian yang menjelaskan mengenai hubungan variabel terhadap objek yang diteliti dengan mengedepankan karakter sebab-akibat atau kausalitas (Sugiyono, 2022). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas pelayanan publik dan pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam memediasi pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas layanan publik.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti

dengan tujuan untuk dipelajari untuk menghasilkan sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) pada periode Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan penyelenggaraan pemerintah daerah periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi dengan jumlah dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2022). Selanjutnya, (Sugiyono, 2022) juga menjelaskan bahwa sampel yang diambil dari sebuah populasi harus benar-benar mampu untuk mewakili sebuah populasi. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh sampel yang mampu mewakili dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. *Purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dengan pertimbangan (kriteria) tertentu atau seleksi khusus (Sugiyono, 2022). Kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini disampaikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3. 1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel	Keterangan
1	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	35 OPD	- RSUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan OPD di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak di hitung sebagai sampel
2	OPD yang tidak/belum menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 hingga Tahun Anggaran 2023	1 OPD	- Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (BRIDA Prov. Jawa Tengah)
3	OPD lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	1 OPD	- Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Total OPD yang menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 – 2023 Periode Penelitian (2018 – 2023)		33 OPD	Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023
Total Sampel		198 Sampel	

Sumber : diolah penulis, 2025

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. (Sugiyono, 2022) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang mana data tersebut tidak diberikan langsung kepada pengumpul data melainkan data melalui orang lain

atau melalui dokumen. Data pada variabel independen yaitu variabel Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit diambil dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai APIP. Data pada variabel intervening yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diambil dari Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel. Data penelitian tersebut didapatkan melalui situs resmi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan sumber resmi lain yang dapat mendukung penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi, menurut (Sugiyono, 2022), merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang terdapat pada buku, arsip, dokumen, angka, dan gambar beserta format pada sebuah laporan maupun suatu keterangan yang dapat dipergunakan untuk penelitian. Data pada penelitian ini didapatkan dengan cara mengunduh Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu variabel dependen (Y), variabel intervening (Z), dan variabel independen (X). Pada penelitian ini variabel

dependen (Y) adalah Kualitas Layanan Publik, dengan variabel intervening (Z) merupakan Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan variabel independen (X) antara lain Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit.

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Layanan publik dapat diartikan sebagai pemberian jasa yang dilakukan oleh entitas yang menyediakan serta bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat (Rangkuti & Kurniawan, 2022). Menurut Ibrahim dalam (Rangkuti & Kurniawan, 2022), kualitas layanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan di mana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian layanan publik tersebut. Zeithaml dalam (Rangkuti & Kurniawan, 2022) menjelaskan kualitas layanan publik dapat diukur dari 5 (lima) dimensi, yaitu *tangibel* (berwujud), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (ketanggapan), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati). Pengukuran kualitas layanan publik pada penelitian ini menggunakan nilai e-SKM Jawa Tengah yang diakses pada laman eskm.jatengprov.go.id dengan rumus sebagai berikut.

$$IKM = \frac{a + b + c + d + e + f + g + h + i}{9}$$

Keterangan :

IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat

a : Persyaratan

b : Prosedur

c : Waktu Pelayanan

- d : Biaya
- e : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f : Kompetensi Pelaksana
- g : Perilaku Pelaksana
- h : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i : Kelengkapan Sarana dan Prasarana

3.5.2 Variabel Intervening (Z)

Laporan keuangan merupakan hasil tanggung jawab para penyusun laporan keuangan (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Hanaffi dalam (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021) menyampaikan bahwa laporan keuangan yang disusun merupakan hasil akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilakukan sebelumnya: tahap identifikasi dokumen, tahap entri jurnal dan periode akuntansi untuk setiap akun. Kualitas laporan keuangan menunjukkan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan (Dewi & Purwanto, 2022). Tujuan mendasar dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan (Andriyani et al., 2020). Halim dalam (Dewi & Purwanto, 2022) menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan berbagai informasi yang berhubungan dengan keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas. Laporan keuangan dapat berkualitas karena adanya sistem akuntansi yang berjalan dengan baik. Secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan ciri kualitatif dari proses akuntansi, di mana akuntabilitas dan transparansi saling mempengaruhi, semakin tinggi kualitas laporan keuangan

pemerintah, semakin besar akuntabilitas dan transparansi, begitu sebaliknya (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diukur dengan menggunakan opini audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah dengan kriteria penilaian minimum 0 untuk opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian (non WTP) dan maksimum 1 untuk opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.5.3 Variabel Independen (X)

Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit.

1) Temuan Audit

Temuan audit merupakan representasi dari hasil evaluasi auditor, baik auditor eksternal, yang dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan juga auditor internal atau APIP terhadap kondisi pengelolaan keuangan, struktur pengendalian internal, dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah (Furqan et al., 2020).

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menunjukkan bahwa Temuan Audit dapat dijadikan bahan evaluasi auditor untuk melihat kualitas efisiensi dan efektivitas kewajaran pelaporan keuangan, struktur pengendalian internal, dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap pengaturan pelaporan keuangan negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Temuan audit menunjukkan sistem pengendalian internal organisasi tidak efektif, tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan, serta pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang tidak efektif (Pertiwi & Wibowo, 2023).

Pengukuran variabel temuan audit pada penelitian ini menggunakan data temuan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai Auditor Internal (APIP) pada rentang tahun 2018 hingga tahun 2023 dengan rumus penghitungan sebagai berikut.

$$\text{Temuan Audit} = \frac{\text{Temuan Selesai}}{\text{Jumlah Temuan}} \times 100 \%$$

2) Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tindak lanjut rekomendasi audit merupakan langkah wajib yang dilakukan oleh audit internal dan segenap pejabat pemerintah daerah untuk memperbaiki kesalahan dan masalah yang ada pada akuntabilitas keuangan publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Tindak lanjut audit merupakan tahapan perbaikan yang dilakukan oleh pemimpin sesuai rekomendasi tindak lanjut atas temuan audit (Furqan et al., 2020). Tindak Lanjut Rekomendasi Audit yang dilakukan dengan baik merupakan bentuk dari pengendalian internal dalam perbaikan kesalahan dan masalah yang ada pada suatu entitas pemerintahan daerah (Lestari & Rohman, 2022). Kualitas laporan keuangan dan kualitas layanan publik secara tidak langsung dapat diperbaiki melalui tindak lanjut rekomendasi audit (Furqan et al., 2020). Tindak Lanjut Rekomendasi Audit diukur dengan membandingkan presentasi rekomendasi audit

yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan total rekomendasi audit yang diberikan oleh auditor (Furqan et al., 2020).

Pengukuran variabel tindak lanjut rekomendasi audit pada penelitian ini menggunakan data jumlah rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai Auditor Internal (APIP) pada rentang tahun 2018 hingga tahun 2023 dengan rumus penghitungan sebagai berikut.

$$\text{Rekomendasi Audit} = \frac{\text{Rekomendasi Selesai}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100 \%$$

Berdasarkan uraian di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini dapat diringkas pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3. 2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Variabel Dependen			
1	Kualitas Layanan Publik	Kualitas layanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan di mana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian layanan publik tersebut. (Rangkuti & Kurniawan, 2022)	$IKM = \frac{a + b + c + d + e + f + g + h + i}{9}$ <p>IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>a : Persyaratan</p> <p>b : Prosedur</p> <p>c : Waktu Pelayanan</p> <p>d : Biaya</p> <p>e : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</p>

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
			f : Kompetensi Pelaksana
			g : Perilaku Pelaksana
			h : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			i : Kelengkapan Sarana dan Prasarana
	Variabel Intervening		
2	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan keuangan yang disusun merupakan hasil akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilakukan sebelumnya: tahap identifikasi dokumen, tahap entri jurnal dan periode akuntansi untuk setiap akun. (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).	Menggunakan opini audit dengan kriteria penilaian minimum 0 untuk opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian (non WTP) dan maksimum 1 untuk opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
	Variabel Independen		
3	Temuan Audit	Temuan audit merupakan representasi dari hasil evaluasi auditor, baik auditor eksternal, yang dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan juga auditor internal atau APIP terhadap kondisi pengelolaan keuangan, struktur pengendalian internal, dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. (Furqan et al., 2020).	Temuan Audit $= \frac{\text{Temuan Selesai}}{\text{Jumlah Temuan}} \times 100 \%$
4	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	Tindak lanjut audit merupakan tahapan perbaikan yang dilakukan oleh pemimpin sesuai rekomendasi tindak lanjut atas temuan audit. (Furqan et al., 2020).	Rekomendasi Audit $= \frac{\text{Rekomendasi Selesai}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100 \%$

Sumber : diolah penulis, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan prosedur sistematis yang melibatkan pemeriksaan dan interpretasi data setelah pengumpulannya (Ghozali, 2021). Penelitian ini menggunakan analisis data guna memberikan jawaban pertanyaan penelitian serta menilai hipotesis yang diberikan. Metodologi penelitian yang dipakai pada penelitian ini melibatkan pemanfaatan teknik analisis regresi linear berganda dan analisis jalur (*path analysis*) untuk menguji hipotesis penelitian diperlukan teknik yang menggunakan persamaan simultan dengan teknik analisis jalur. Dalam menganalisis data yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan program aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) (Ghozali, 2021).

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif dilaksanakan sebelum melaksanakan pengujian terhadap model dan hipotesis. Statistik Deskriptif merupakan statistik yang diperlukan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2022). Uji Statistik Deskriptif dilaksanakan guna menganalisis data berlandaskan nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, nilai median dan nilai standar deviasi dari suatu variabel (Sugiyono, 2022).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Hipotesis memerlukan uji asumsi klasik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji normalitas, multikolinearitas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas yang akan dilaksanakan pada penelitian ini (Ghozali, 2021). Apabila segala asumsi terpenuhi dalam regresi maka perkiraan hasil yang dihasilkan akan bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). *Best* memiliki arti varians yang paling minimum di antara nilai varians alternatif pada setiap model yang ada. *Linear* berarti linier pada variabel acak (Y). *Unbiased* memiliki arti tidak bias atau nilai harapan dari estimator sama atau mendekati nilai parameter yang sebenarnya (Ghozali, 2021).

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residu yang memiliki distribusi normal (Ghozali, 2021). Pada penelitian ini uji normalitas dilaksanakan dengan uji *Kolmogorof-Smirnov* dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikansi α sebesar 0,05. Apabila $p\text{-value} > \alpha$, maka data berdistribusi normal, namun apabila $p\text{-value} < \alpha$ maka data tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi dapat menemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2021). Timbulnya multikolinearitas dapat dilihat dengan menggunakan

nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* yang didapatkan dari pengolahan data mana dalam penghitungan model regresi harus memiliki nilai tolerance di atas 0,10. Jika lebih rendah dari 0,10 maka akan terjadi multikolinearitas. Sedangkan hasil penghitungan kinerja VIF, jika memiliki kinerja VIF kurang dari 10, maka tidak memiliki persoalan multikolinearitas (Ghozali, 2021).

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) pada model regresi linear (Ghozali, 2021). Model regresi yang baik merupakan model regresi yang terbebas dari masalah autokorelasi (Ghozali, 2021). Uji *Durbin Watson* (*DW test*) dilakukan untuk menguji adanya autokorelasi. Kriteria dalam pengujian *Durbin Watson* disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis Nol (H_0)	Keputusan	Ketentuan
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Ditolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - d_u \leq d \leq d - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Diterima	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber : (Ghozali, 2021)

Keterangan :

d = Durbin Watson;

du = Durbin Watson Upper;

dl = Durbin Watson Lower.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2021). Apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas, namun apabila berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas merupakan model regresi yang baik. Uji heteroskedastisitas dapat dilaksanakan dengan menggunakan uji *Glejser* dengan cara melakukan regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan ketentuan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Model Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilaksanakan dengan tujuan untuk menaksir pengaruh variabel independen yang lebih dari satu terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2021). Model regresi linear berganda dilaksanakan guna mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel

dependen. Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel *intervening* terhadap kualitas layanan publik. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_1$$

$$Y = \alpha + \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Z + \varepsilon_2$$

Keterangan :

Z = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Y = Kualitas Layanan Publik

α = konstanta

X_1 = Temuan Audit

X_2 = Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

β_{1-5} = Koefisien regresi

ε = *error of term* (variabel pengganggu)

3.6.4 Uji Goodness of Fit Model

Keakuratan fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai sebenarnya dapat diukur melalui *Goodness of Fit*nya (Ghozali, 2021). Secara statistik, *Goodness of Fit* setidaknya dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Perhitungan statistik dianggap signifikan apabila nilai uji statistik berada pada daerah kritis (daerah di mana H_0 ditolak). Sebaliknya, apabila nilai uji statistik berada dalam daerah H_0 yang diterima, maka dianggap tidak signifikan.

1) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen penelitian berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilaksanakan dengan cara mengukur nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil $\leq 0,05$, maka variabel independen bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan memiliki arti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model telah fit dan dapat digunakan pada pengujian selanjutnya.

2) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen yang dapat dilihat pada $Adjusted R^2$ (Ghozali, 2021). Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 (satu) memiliki arti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah diajukan dengan cara menguji menggunakan analisis regresi melalui Uji t. Analisis regresi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial serta untuk mengetahui seberapa besar dominasi variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Metode uji hipotesis yang telah diajukan dilaksanakan melalui pengujian secara parsial.

1) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah satu variabel independen secara individual memiliki pengaruh dalam menerangkan variasi variabel independen. Pengujian ini dilaksanakan dengan cara mengukur nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil $\leq 0,05$ maka hipotesis yang telah diajukan diterima serta secara individual variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan secara individual variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021).

3.6.6 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear

berganda, digunakan untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model causal*) yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk menguji pengaruh variabel intervening di dalam model penelitian (Ghozali, 2021). *Path Analysis* dapat dilakukan dengan dua cara pengujian yaitu antara lain :

1. Meregresikan model penelitian kemudian menghitung pengaruh tidak langsung dengan *Sobel Test* kemudian membandingkannya dengan t_{tabel} ; dan
2. Menggunakan metode *Bootstrap Script*.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memiliki visi dan misi dalam memberikan pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur selaku Kepala Daerah dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur pelaksana terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas, sedangkan unsur penunjang dibagi menjadi unsur penunjang urusan pemerintahan, yang terdiri atas Badan, dan urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri atas Inspektorat.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Gubernur sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan melaksanakan tugas sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta unit di bawah adalah sebagai berikut.

- a. Fungsi Kesekretariatan Daerah, terdiri atas fungsi kesekretariatan eksekutif, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris

Daerah. Selain itu, terdapat fungsi kesekretariatan legislatif, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

- b. Fungsi Dinas Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan berdasarkan fungsi unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- c. Fungsi Badan Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan berdasarkan fungsi penunjang unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4.2 Deskripsi Variabel

Deskripsi Variabel dilaksanakan dengan melakukan pengujian statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran data dengan merinci nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, nilai median, dan nilai standar deviasi pada variabel penelitian. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Descriptive Statistics					
		Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation	
Temuan Audit	198	0	61	10.19	10.50	6.901	
Tindak Lanjut	198	0	100	95.79	95.00	19.737	
Rekomendasi Audit							
Opini Audit	198	0	1	0.86	1.00	.349	
Survei Kepuasan	198	78	91	84.34	84.00	2.896	
Masyarakat							
Valid N (listwise)	198						

Sumber : diolah penulis, 2025

1. Temuan Audit

Berdasarkan data pada tabel uji statistik deskriptif, dapat disampaikan bahwa variabel Temuan Audit bernilai minimum 0 yang memiliki arti bahwa terdapat 0 temuan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang ditemukan pada tahun 2018 yaitu pada perangkat daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2018, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2018, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018, sedangkan bernilai maksimum 61 yang memiliki arti bahwa terdapat 61 temuan dalam satu tahun anggaran pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah yaitu pada perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023. Nilai mean variabel Temuan Audit sebesar 10,19 dengan nilai median sebesar 10,50 yang memiliki arti bahwa secara rerata terdapat 10,19 temuan audit yang ditemukan pada tiap Organisasi Perangkat Daerah per tahun anggaran. Nilai standar deviasi pada variabel Temuan Audit bernilai 6,901 dengan nilai mean sebesar 10,19 yang menunjukkan bahwa penyebaran data pada variabel Temuan Audit memiliki tingkat penyebaran yang tinggi. Ini berarti nilai-nilai dalam data bervariasi secara signifikan dan tidak terkonsentrasi dekat dengan mean.

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Berdasarkan data pada tabel uji statistik deskriptif, dapat disampaikan bahwa variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Audit bernilai minimum 0 yang

memiliki arti bahwa terdapat rasio 0% terhadap tindak lanjut rekomendasi audit yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Rasio tersebut memiliki arti bahwa terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang memang tidak memiliki rekomendasi audit yang berasal dari auditor sehingga Organisasi Perangkat Daerah tersebut tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi audit, sedangkan bernilai maksimum sebesar 100 yang memiliki arti bahwa terdapat rasio sebesar 100% terhadap tindak lanjut rekomendasi audit yang telah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nilai mean variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Audit sebesar 93,69 dengan nilai median sebesar 95,00 yang memiliki arti bahwa secara rerata terdapat 93,69% tindak lanjut terhadap rekomendasi audit yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada tahun anggaran berjalan. Nilai standar deviasi pada variabel tindak lanjut rekomendasi audit bernilai 19,737 dengan nilai mean sebesar 93,69 yang menunjukkan bahwa persebaran data yang relatif tinggi dikarenakan pada hampir seluruh data terkumpul dinyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah telah menyelesaikan hampir seluruh tindak lanjut terhadap rekomendasi audit yang diberikan oleh auditor kepada Organisasi Perangkat Daerah tersebut.

3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan data pada tabel uji statistik deskriptif, dapat disampaikan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pengukuran menggunakan opini audit terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah bernilai minimum 0 dan maksimum 1 yang memiliki arti bahwa data kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan data dummy dengan nilai opini audit dari BPK terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bernilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan nilai proxy 1 sehingga data nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bernilai 1 dengan standar deviasi sebesar 0,349.

4. Kualitas Layanan Publik

Berdasarkan data pada tabel uji statistik deskriptif, dapat disampaikan bahwa variabel Kualitas Layanan Publik dengan pengukuran menggunakan nilai Survei Kepuasan Masyarakat bernilai minimum 78 yang memiliki arti bahwa terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 78 yaitu pada perangkat daerah Dinas Perhubungan pada tahun 2019, sedangkan bernilai maksimum 91 yang memiliki arti bahwa terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 91 yaitu pada perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPA-PPKB) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tahun 2023. Nilai mean variabel Kualitas Layanan Publik dengan pengukuran menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat memiliki nilai 84,34 dengan nilai median sebesar 85,00 yang memiliki arti bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2023 nilai rerata yang diperoleh oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi objek

penelitian memperoleh nilai pada Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 84,34 dan menunjukkan bahwa variabel Kualitas Layanan Masyarakat memiliki nilai yang tinggi. Nilai standar deviasi pada variabel Kualitas Layanan Publik bernilai 2,896 dengan nilai mean sebesar 84,34 menunjukkan bahwa penyebaran data pada variabel Kualitas Layanan Publik cukup rendah. Ini berarti sebagian besar nilai pada variabel Kualitas Layanan Publik berada dekat dengan rata-rata dan variabilitas antar nilai pada variabel tersebut sangat kecil.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Pada penelitian ini, uji normalitas dilaksanakan menggunakan uji *Kolmogorof-Smirnov* dengan hasil yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 2
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N	198	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean .0000000	
	Std. Deviation 2.89134900	
Most Extreme Differences	Absolute .062	
	Positive .062	
	Negative -.053	
Test Statistic	.062	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.064 ^c	

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : data sekunder yang diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* memperoleh nilai sig. sebesar 0,064 dimana nilai tersebut $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen, dengan memperhatikan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Apabila nilai VIF , 10 dan nilai tolerance $> 0,1$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a		Collinearity Statistics Tolerance	VIF
Model	(Constant)		
1	Temuan Audit	.999	1.001
	Rekomendasi	.998	1.002
	Temuan Audit		
	Opini Audit	.999	1.001

a. Dependent Variable: Survey Kepuasan
Masyarakat

Sumber : Data sekunder yang diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel Temuan Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Opini Audit memperoleh nilai VIF < 10 sebesar masing-masing 1,001 pada Temuan

Audit dan Opini Audit serta 1.002 pada Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan nilai *tolerance* > 0,1 sebesar masing-masing 0,999 pada Temuan Audit dan Opini Audit serta 0,998 pada Tindak Lanjut Rekomendasi Audit. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilaksanakan untuk menemukan apakah terdapat heteroskedastisitas pada model regresi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* dengan melakukan regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen dan didapatkan hasil yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	84.708	1.189	71.213	.000
	Temuan Audit	-.017	.030	-.041	.570
	Rekomendasi	.005	.010	.037	.601
	Temuan Audit				
	Opini Audit	-.841	.592	-.101	-1.422
					.157

a. Dependent Variable: Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : Data sekunder yang diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* yang disajikan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel Temuan Audit memperoleh nilai sig. 0,570 > 0,05. Variabel Tindak Lanjut Rekomendasi

Audit memperoleh nilai sig. $0,601 > 0,05$. Variabel Opini Audit memperoleh nilai sig. $0,157 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilaksanakan untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson (DW test)* dengan kriteria pengambilan keputusan $d_U < d < 4 - d_U$. Hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b		Adjusted	RStd. Error of the		
Model	R	R Square	Square	Estimate	Durbin-Watson
1	.116 ^a	.014	-.002	2.899	1.788

a. Predictors: (Constant), Opini Audit, Temuan Audit, Rekomendasi Temuan Audit
b. Dependent Variable: Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : data sekunder yang diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,788. Dimana nilai d_U adalah 1,787 dan nilai $4 - d_U$ adalah 2,213 yang berarti $d_U (1,787) > 1,788 < 4 - d_U (2,213)$. Dapat

disimpulkan bahwa data penelitian telah memenuhi kriteria pengambilan keputusan dan tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilaksanakan guna mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen yaitu variabel Temuan Audit dan variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap variabel dependen yaitu variabel Kualitas Layanan Publik. Hasil dari analisis regresi linear berganda pada penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients Beta
1 (Constant)	.911	.128	
Temuan Audit	.000	.004	.008
Rekomendasi	.001	.001	-.033
Temuan Audit			

a. Dependent Variable: Opini Audit

Sumber : data sekunder yang diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.6, maka diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$Z = 0,911 + 0,000x_1 + 0,001x_2$$

Penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan regresi adalah sebagai berikut.

- Konstanta bernilai 0,911 dengan koefisien positif yang memiliki arti nilai Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dianggap bernilai 0 atau konstan, maka nilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh nilai 0,911.
- Variabel X_1 Temuan Audit menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,000 yang memiliki arti nilai Temuan Audit yang diungkapkan oleh auditor maka tidak akan berdampak sama sekali terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun.
- Variabel X_2 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit menghasilkan nilai koefisien positif sebesar 0,001 yang memiliki arti semakin tinggi nilai Tindak Lanjut Rekomendasi Audit yang dilakukan maka akan berdampak terhadap tingginya nilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun.

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	84.708	1.189	
	Temuan Audit	-.017	.030	-.041
	Rekomendasi Temuan Audit	.005	.010	.037
	Opini Audit	.841	.592	-.101

a. Dependent Variable: Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : data sekunder yang diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.7, maka diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$Y = 84,708 - 0,017x_1 + 0,005x_2 + 0,841z$$

Penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan regresi adalah sebagai berikut.

- Konstanta bernilai 84,708 dengan koefisien positif yang memiliki arti nilai Temuan Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Opini Audit atau Kualitas Laporan Keuangan dianggap bernilai 0 atau konstan, maka nilai Kualitas Layanan Publik memperoleh nilai 84,708.
- Variabel X_1 Temuan Audit menghasilkan nilai koefisien negatif sebesar 0,017 yang memiliki arti semakin tinggi nilai Temuan Audit yang diungkapkan oleh auditor maka akan memiliki dampak negatif terhadap Kualitas Layanan Publik yang diberikan.
- Variabel X_2 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit menghasilkan nilai koefisien positif sebesar 0,005 yang memiliki arti semakin tinggi nilai Tindak Lanjut Rekomendasi Audit yang dilakukan maka akan berdampak terhadap tingginya nilai Kualitas Layanan Publik yang diberikan.
- Variabel Z Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Opini Audit menghasilkan nilai koefisien positif sebesar 0,841 yang memiliki arti semakin tinggi nilai Opini Audit yang diberikan maka akan berdampak terhadap tingginya nilai Kualitas Layanan Publik yang diberikan.

4.3.3 Hasil Uji *Godness of Fit Model*

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang dapat dilihat pada nilai *Adjusted R²*. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b		Adjusted R	Std. Error of	
Model	R	R Square	Square	the Estimate
1	.995 ^a	.989	.989	.71797
a. Predictors: (Constant), Opini Audit, Temuan Audit, Rekomendasi Temuan Audit				
b. Dependent Variable: Survey Kepuasan Masyarakat				

Sumber : data sekunder yang diolah (2025)

Berdasarkan data pada tabel 4.8, uji koefisien determinasi memperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0.989 yang berarti nilai tersebut dapat menunjukkan bahwa variabel Temuan Audit dan variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel intervening dengan nilai proxy menjelaskan variabel Kualitas Layanan Publik sebesar 98,9% sedangkan sisanya sebesar 1,1% dijelaskan oleh variabel lain. Dengan kata lain, variabel independen pada penelitian ini memberikan pengaruh sebesar 98,9% terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Uji F dilaksanakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen penelitian berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependennya. Hasil Uji F pada penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 9

Hasil Uji F

ANOVA^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22.421	3	7.474	2.849	.048 ^b
	Residual	1629.907	194	8.402		
	Total	1652.328	197			

a. Dependent Variable: Survey Kepuasan Masyarakat
b. Predictors: (Constant), Opini Audit, Temuan Audit, Rekomendasi Temuan Audit

Sumber : data sekunder yang diolah (2025)

Berdasarkan data pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil dari uji F memperoleh nilai F-hitung sebesar 2,849 dan F tabel sebesar 2,65, dimana nilai F-hitung > F tabel dan nilai sig. 0,048 < 0,05 yang berarti **H₀ ditolak** dan **H_a diterima**. Maka dapat diartikan bahwa variabel independen yang terdiri dari variabel Temuan Audit, variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Opini Audit secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kualitas Layanan Publik.

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah satu variabel independen secara individual memiliki pengaruh dalam menerangkan variasi variabel independen. Hasil uji t pada penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 10

Hasil Uji t

Variabel X ke Z

Coefficients^a						Keputusan
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1 (Constant)	.911	.128		7.097	.000	
Temuan Audit	.000	.004	.008	.107	.015	diterima
Rekomendasi	-.001	.001	-.033	-.465	.042	diterima
Temuan Audit						
a. Dependent Variable: Opini Audit						

Sumber : data sekunder yang diolah (2025)

Tabel 4. 11

Hasil Uji t

Variabel X dan Z ke Y

Coefficients^a						Keputusan
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1 (Constant)	84.708	1.189		71.213	.000	
Temuan Audit	-.017	.030	-.041	-.569	.070	ditolak
Rekomendasi	.005	.010	.037	.524	.061	ditolak
Temuan Audit						
Opini Audit	-.841	.592	-.101	-1.422	.157	ditolak
a. Dependent Variable: Survey Kepuasan Masyarakat						

Sumber : data sekunder yang diolah (2025)

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil uji t adalah sebagai berikut.

1. Hipotesis 1

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,107 dan t tabel sebesar 1,97208 dimana nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai sig. $0,015 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 **diterima**, yang memiliki arti Temuan Audit yang diungkapkan oleh Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Hipotesis 2

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -0,465 dan t tabel sebesar 1,97208 dimana nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai sig. $0,042 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 **diterima**, yang memiliki arti Tindak Lanjut Rekomendasi Audit yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas hasil Temuan Audit yang dilakukan oleh Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Hipotesis 3

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -0,569 dan t tabel sebesar 1,97208 dimana nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai sig. $0,070 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 **ditolak**, yang memiliki arti Temuan Audit yang diungkapkan oleh Auditor tidak berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Publik yang diberikan oleh Perangkat Daerah.

4. Hipotesis 4

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,524 dan t tabel sebesar 1,97208 dimana nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai sig. $0,061 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak, yang memiliki arti Tindak Lanjut Rekomendasi Audit yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atas hasil Temuan Audit yang dilakukan oleh Auditor tidak berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Publik yang diberikan oleh Perangkat Daerah.

5. Hipotesis 7

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -1.422 dan t tabel sebesar 1,97208 dimana nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai sig. $0,157 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_7 ditolak, yang memiliki arti Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Opini Audit yang diterima oleh Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Publik yang diberikan oleh Perangkat Daerah.

4.3.5 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis Jalur (*Path Analysis*) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Analisis jalur digunakan untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model causal*) yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk menguji pengaruh variabel intervening di dalam model

penelitian. Hasil analisis jalur pada penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 12
Hasil Perhitungan *Sobel Test*
 Moderasi Z terhadap X₁ dan Y

Variabel	Test Statistic	p-value	Kesimpulan
X ₁	-.017		
Z	-.841		
Std. X ₁	.030	.526	
Std. Z	.592	.598	Tidak berpengaruh (H₅ ditolak)

Sumber : data sekunder yang diolah (2025)

Tabel 4. 13
Hasil Perhitungan *Sobel Test*
 Moderasi Z terhadap X₂ dan Y

Variabel	Test Statistic	p-value	Kesimpulan
X ₁	.005		
Z	-.841		
Std. X ₁	.010	-.471	
Std. Z	.592	.637	Tidak berpengaruh (H₆ ditolak)

Sumber : data sekunder yang diolah (2025)

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil *Sobel Test* adalah sebagai berikut.

1. Hipotesis 5

Hasil *Sobel Test* menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar $0,598 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H₅ **ditolak**, yang memiliki arti variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah tidak mempengaruhi hubungan antara variabel Temuan Audit dan variabel Kualitas Layanan Publik.

2. Hipotesis 6

Hasil *Sobel Test* menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar $0,637 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_6 **ditolak**, yang memiliki arti variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi hubungan antara variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan variabel Kualitas Layanan Publik.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,107 dan t tabel sebesar 1,97208, dimana nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai sig. $0,015 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 **diterima**, yang memiliki arti Temuan Audit yang diungkapkan oleh Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Temuan Audit yang diungkapkan oleh Auditor dianggap sebagai faktor penentu dalam nilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ketika nilai Temuan Audit tinggi, maka laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah cenderung mengandung salah saji material sehingga mempengaruhi opini atas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit

tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori keagenan, pengawasan terhadap agen dilaksanakan untuk memastikan seluruh informasi keuangan yang disampaikan terjamin dan bebas dari informasi asimetris. Dengan demikian, semakin banyak temuan audit atas laporan keuangan perangkat daerah, maka kemungkinan untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian secara kolektif pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin kecil.

Penelitian ini memperhatikan bahwa pemerintah daerah melalui seluruh perangkat daerah harus berupaya untuk menempatkan temuan audit pada level yang lebih rendah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sesuai dengan yang disampaikan oleh (Furqan et al., 2020). Dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan bahwa ketika pemerintah daerah memiliki temuan audit, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak bentuk pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan efisien (Pertiwi & Wibowo, 2023).

Selain itu, temuan audit menunjukkan penurunan kredibilitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang akan berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan juga dapat mengakibatkan potensi kerugian dan kurangnya pendapatan, yang berdampak material terhadap perangkat daerah terkait (Pertiwi & Wibowo, 2023). Selain hal tersebut, pelanggaran kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan akan berdampak pada penyajian informasi keuangan yang tidak wajar, yang mempengaruhi opini yang diperoleh.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi & Wibowo (2023), dan Furqan et al. (2020), yang menyatakan bahwa Temuan Audit yang diungkapkan oleh Auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan penelitian ini tidak selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Rohman (2022) yang menyatakan bahwa Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.4.2 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -0,465 dan t tabel sebesar 1,97208 dimana nilai t hitung < t tabel dan nilai sig. 0,042 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, yang memiliki arti Tindak Lanjut Rekomendasi Audit yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas hasil Temuan Audit yang dilakukan oleh Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tindak Lanjut Rekomendasi Audit yang dilakukan dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah pada pemerintahan daerah belum dapat menjamin bahwa laporan keuangan terbebas dari kesalahan. Namun di sisi lain, tindak lanjut rekomendasi audit merupakan tindak lanjut yang dilakukan dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang merupakan komitmen pimpinan pada perangkat daerah untuk melaksanakan perubahan sesuai dengan temuan audit yang ditemukan oleh auditor.

Penilaian terhadap tindak lanjut rekomendasi audit yang dilaksanakan oleh auditor kepada perangkat daerah cenderung menunjukkan persepsi bahwa perangkat daerah menindaklanjuti temuan audit yang disampaikan oleh auditor yang selanjutnya ditindaklanjuti agar tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya atau pada masa penilaian yang dilakukan oleh auditor dalam masa pengawasan terhadap perangkat daerah.

Belum adanya sanksi yang tegas bagi unit kerja atau perangkat daerah yang lalai dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil audit tidak mengesampingkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit mempengaruhi laporan keuangan perangkat daerah secara signifikan. Komitmen pimpinan terhadap tindak lanjut rekomendasi merupakan indikator yang menentukan bagaimana pada akhirnya laporan keuangan perangkat daerah setelah tahun berjalan dapat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh auditor mengenai nilai wajar material pada laporan keuangan pada tahun dilakukannya pengawasan oleh auditor.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Furqan et al. (2020) dan Agustina & Setyaningrum (2020) yang menyatakan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak selaras dengan temuan yang dilakukan oleh Pertiwi & Wibowo (2023).

4.4.3 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kualitas Layanan Publik

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -0,569 dan t tabel sebesar 1,97208 dimana nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai sig. 0,070 $>$ 0,05.

Maka dapat disimpulkan bahwa H₃ **ditolak**, yang memiliki arti Temuan Audit yang diungkapkan oleh Auditor tidak berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Publik yang diberikan oleh Perangkat Daerah.

Temuan audit mengindikasikan adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut yang menyebabkan pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah tidak efektif dan berdampak pada pemberian layanan kepada publik. Menurut teori keagenan, hubungan keagenan antara agen dan prinsipal akan menyebabkan munculnya informasi asimetris yang berdampak pada *moral hazard*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit tidak mempengaruhi kualitas layanan publik.

Peneliti berpendapat bahwa jumlah temuan yang tidak material dianggap berdampak signifikan terhadap kinerja administrasi pemerintahan. Hal tersebut juga tidak didukung oleh teori keagenan. Oleh karena itu, pemerintah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk menjamin akuntabilitas dalam pelayanan publik (Pertiwi & Wibowo, 2023). Temuan audit juga dinilai dari jumlah kasus yang terkait dengan pengelolaan keuangan, sedangkan kualitas layanan publik pada pemerintah daerah diwakili oleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah setiap semester pada tiap tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, hal tersebut mungkin tidak menggambarkan keseluruhan hubungan antara variabel tersebut karena temuan audit tidak hanya terkait dengan kinerja keuangan namun juga terkait permasalahan administrasi pemerintahan ((Pertiwi & Wibowo, 2023). Argumen

lainnya adalah bahwa temuan audit tidak secara langsung terkait dengan kegiatan pelayanan kepada publik atau pengawasan internal yang berjalan secara efektif. Tindak lanjut rekomendasi audit yang segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah juga dimungkinkan.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi & Wibowo (2023) yang menyatakan bahwa Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Publik, namun tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Furqan et al. (2020) yang menyatakan bahwa Temuan Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Layanan Publik.

4.4.4 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kualitas Layanan Publik

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,524 dan t tabel sebesar 1,97208 dimana nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai sig. 0,061 $>$ 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak, yang memiliki arti Tindak Lanjut Rekomendasi Audit yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atas hasil Temuan Audit yang dilakukan oleh Auditor tidak berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Publik yang diberikan oleh Perangkat Daerah.

Mengacu pada teori keagenan, manajemen akan berusaha menjalankan perusahaan dan kepentingan perusahaan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Tindak lanjut rekomendasi audit berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkungan pemerintahan, terutama pada pengelolaan keuangan.

Auditor mewajibkan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit, dan entitas tersebut wajib menyampaikan laporan tindak lanjut selambat-lambatnya 60 hari sejak rekomendasi hasil pemeriksaan diberikan. Tindak lanjut yang baik akan berimplikasi pada peningkatan tata kelola organisasi yang baik. Pelaksanaan tindak lanjut tersebut hanya sebatas pada pemenuhan atas rekomendasi yang diberikan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan entitas pemerintah pada tahun anggaran yang diawasi, namun tidak mencerminkan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah secara umum terutama terkait dengan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi & Wibowo (2023) dan Furqan et al. (2020) yang menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik.

4.4.5 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Hubungan Antara Temuan Audit dan Kualitas Layanan Publik

Berdasarkan hasil *Sobel Test* menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar $0,598 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_5 ditolak, yang memiliki arti variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi hubungan antara variabel Temuan Audit dan variabel Kualitas Layanan Publik.

Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak dapat memediasi pengaruh temuan audit keuangan terhadap kualitas layanan publik yang diberikan

oleh entitas pemerintahan. Pemerintah bersedia memberikan nilai terbaik dalam rangka pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan gambaran kinerja pemerintah (Pertiwi & Wibowo, 2023). Semakin kecil adanya temuan audit, menggambarkan pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan cukup baik, yang mempengaruhi opini yang diberikan oleh auditor dan namun tidak sepenuhnya memberikan gambaran utuh bagaimana kinerja pemerintah terhadap publik. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap temuan audit yang mempengaruhi kualitas layanan publik melalui kualitas laporan keuangan.

Temuan audit tidak berdampak signifikan terhadap kualitas layanan publik, diduga karena audit yang dilakukan hanya sebatas berdasarkan proses pengelolaan keuangan yang tidak mencakup penilaian terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Selain hal tersebut, kualitas laporan keuangan tidak dapat memediasi pengaruh temuan audit terhadap kualitas layanan publik dikarenakan pemeriksaan laporan keuangan hanya sebatas penilaian kewajaran laporan keuangan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi & Wibowo (2023) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan tidak dapat memediasi temuan audit yang dilakukan oleh auditor terhadap kinerja pemerintahan dengan penilaian berupa kualitas layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Namun pernyataan lain disampaikan oleh Furqan et al. (2020) bahwa kualitas laporan keuangan dapat memediasi temuan audit terhadap kualitas layanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.

4.4.6 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Hubungan Antara Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Kualitas Layanan Publik

Berdasarkan hasil *Sobel Test* menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar $0,637 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_6 ditolak, yang memiliki arti variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi hubungan antara variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan variabel Kualitas Layanan Publik.

Hasil tersebut dapat diasumsikan bahwa tindakan konkret untuk memperbaiki temuan audit melalui tindak lanjut yang dilaksanakan dari rekomendasi audit belum tentu dapat meningkatkan kualitas publik dan lebih berfokus pada peningkatan kualitas pengungkapan informasi pada laporan keuangan tahun berikutnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Furqan et al. (2020) yang menyampaikan bahwa kualitas laporan keuangan tidak dapat memediasi pengaruh tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi & Wibowo (2023) menyampaikan bahwa kualitas laporan keuangan dapat memediasi pengaruh tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas layanan publik.

4.4.7 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Layanan Publik

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -1.422 dan t tabel sebesar 1,97208 dimana nilai t hitung < t tabel dan nilai sig. 0,157 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_7 ditolak, yang memiliki arti Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Opini Audit yang diterima oleh Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Publik yang diberikan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan teori keagenan, laporan keuangan diperlukan dalam rangka menghindari informasi yang asimetris antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Penilaian kinerja pemerintah terutama terkait pemberian layanan publik kepada masyarakat tidak hanya tercermin dari pemberian opini audit semata, namun juga dari indikator-indikator lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemberian opini audit tidak menjadi nilai mutlak terhadap penilaian kinerja pemerintah terutama dalam hal peningkatan kualitas layanan publik.

Selain itu, auditor hanya melaksanakan pemeriksaan sebatas pada kewajaran laporan keuangan entitas pemerintahan, sehingga tidak selalu diikuti dengan pengawasan kinerja pemerintah terutama dalam hal pemberian layanan publik kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi & Wibowo (2023) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan publik, sedangkan Furqan et al. (2020)

dalam penelitiannya menyampaikan hal sebaliknya bahwa kualitas laporan keuangan selaras dan berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau publik.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Layanan Publik dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel intervening. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Layanan Publik dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel intervening, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Temuan Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis 1 **diterima**. Temuan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disebabkan apabila nilai Temuan Audit tinggi, maka laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah cenderung mengandung salah saji material sehingga mempengaruhi opini atas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga hipotesis 2 **diterima**. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disebabkan oleh penilaian terhadap tindak lanjut rekomendasi audit yang dilaksanakan oleh auditor kepada perangkat daerah cenderung menunjukkan persepsi bahwa perangkat daerah menindaklanjuti temuan audit yang disampaikan oleh auditor yang selanjutnya ditindaklanjuti agar tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya atau pada masa penilaian yang dilakukan oleh auditor dalam masa pengawasan terhadap perangkat daerah.
3. Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Publik, sehingga hipotesis 3 **ditolak**. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan publik dikarenakan temuan audit dinilai dari jumlah kasus yang terkait dengan pengelolaan keuangan, sedangkan kualitas layanan publik pada pemerintah daerah diwakili oleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah setiap semester pada tiap tahun anggaran berjalan. Selain itu, temuan audit tidak secara langsung terkait dengan kegiatan pelayanan kepada publik atau pengawasan internal yang berjalan secara efektif.
4. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Publik, sehingga hipotesis 4 **ditolak**. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan publik dikarenakan

pelaksanaan tindak lanjut tersebut hanya sebatas pada pemenuhan atas rekomendasi yang diberikan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan entitas pemerintah pada tahun anggaran yang diawasi, namun tidak mencerminkan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah secara umum terutama terkait dengan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi hubungan antara Temuan Audit dan Kualitas Layanan Publik, sehingga hipotesis 5 **ditolak**. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak mempengaruhi hubungan antara temuan audit dan kualitas layanan publik disebabkan pemeriksaan laporan keuangan hanya sebatas penilaian kewajaran laporan keuangan.
6. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi hubungan antara Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Kualitas Layanan Publik, sehingga hipotesis 6 **ditolak**. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak mempengaruhi hubungan antara tindak lanjut rekomendasi audit dan kualitas layanan publik dikarenakan dapat diasumsikan bahwa tindakan konkret untuk memperbaiki temuan audit melalui tindak lanjut yang dilaksanakan dari rekomendasi audit belum tentu dapat meningkatkan kualitas publik dan lebih berfokus pada peningkatan kualitas pengungkapan informasi pada laporan keuangan tahun berikutnya.
7. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Publik, sehingga hipotesis 7 **ditolak**. Kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan publik dikarenakan hal tersebut menggambarkan bahwa pemberian opini audit tidak menjadi nilai mutlak terhadap penilaian kinerja pemerintah terutama dalam hal peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, auditor hanya melaksanakan pemeriksaan sebatas pada kewajaran laporan keuangan entitas pemerintahan, sehingga tidak selalu diikuti dengan pengawasan kinerja pemerintah terutama dalam hal pemberian layanan publik kepada masyarakat.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang telah disampaikan maka implikasi yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan variabel lain seperti Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sehingga dapat lebih menggambarkan faktor – faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan juga Kualitas Layanan Publik sehingga penelitian dapat lebih komprehensif.

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan, masukan, dan motivasi serta bahan evaluasi untuk mengembangkan kebijakan maupun program dan kegiatan yang lebih

efektif untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maupun Kualitas Layanan Publik yang diberikan kepada masyarakat secara lebih komprehensif tidak hanya melalui perspektif keuangan pemerintah daerah namun juga menyangkut perspektif layanan publik secara luas.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan analisis data dan pembahasan, dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian dilaksanakan dengan metode pengumpulan data sekunder, dimana data diperoleh dari instansi pengawas internal pemerintah atau Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan data yang diberikan masih diperlukan untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut sehingga data dapat dimasukkan ke dalam aplikasi pengolah data setelah data tersebut diolah, sehingga memerlukan beberapa langkah untuk dapat melaksanakan proses olah data.
2. Pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah peneliti hanya sebatas menggunakan indikator opini audit oleh BPK terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dan adanya keterbatasan untuk mengakses seluruh laporan keuangan perangkat daerah yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikarenakan tidak seluruh perangkat daerah mengunggah data laporan keuangan perangkat daerah pada laman resmi perangkat daerah tersebut sehingga hasil yang didapatkan

oleh peneliti hanya sebatas opini audit secara umum pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Hasil dari penelitian ini serta keterbatasan – keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan ide bagi penelitian selanjutnya yang mana diperlukan adanya pengembangan variabel – variabel lain untuk dapat memperkaya dan memperkuat faktor – faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maupun Kualitas Layanan Publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian peneliti juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mencari obyek penelitian lain, tidak hanya pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk dapat dijadikan obyek penelitian selanjutnya agar penelitian terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan kualitas layanan publik yang dilaksanakan pemerintah dapat tergambar secara lebih luas dan dapat dijadikan data pembanding serta rekomendasi bagi pemerintah daerah tersebut untuk dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N., & Setyaningrum, D. (2020). Determinants Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(3), 226–239. <https://www.researchgate.net/publication/341227260>
- Andriyani, N., Mukhzarudfa, & Diah, E. (2020). PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL(STUDI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(2), 132–144.
- Angela, T., Nindito, M., & Khairunnisa, H. (2023). PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT, DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(2), 506–525. <http://journal.unj.ac.id/journal/index.php/japa>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *PEMPROV JATENG BERHASIL PERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN 13 KALI BERTURUT-TURUT.* <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/07/28.pdf>
- Cendana, G. A., & Oktariyanda, T. A. (2022). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DESA JOMBOK KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG. *Journal Republika*, 10(4). <https://doi.org/10.26740>
- Dewi, S. A. N. K., & Purwanto, A. (2022). ANALISIS PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KUALITAS LKPD, TINGKAT

KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA SITUS RESMI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di JawaTengah). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Firdausijah, R. T., & Priatna, A. (2020). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 113–119. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2899/1286>

Freeman, R. E., & McVea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>

Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Chariri, A. (2014). *Teori Akuntansi* (4th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA : LITERATURE REVIEW. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(2).

- Lestari, A. D., & Rohman, A. (2022). PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada LKPD Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia Tahun 2016-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33901>
- Margaret, E., & Daljono. (2023). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 12(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nurfaidah, & Novita. (2022). Bagaimanakah Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2, 259–269.
- Nurohmayni Putri. (2024). Analisis Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Lampung. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 01–04. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i2.680>
- Pamungkas, B., Avrian, C., & Ibtida, R. (2019). Factors influencing audit findings of the Indonesian district governments' financial statements. *Cogent Business and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1673102>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA*.

Pertiwi, P. K., & Wibowo, P. (2023). Government Reporting and Quality of Public Services: Are They Twins? *Journal of Accounting and Investment*, 24(1), 1–24. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16193>

Rangkuti, S. A., & Kurniawan, I. (2022). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 25(2), 201. <https://doi.org/10.31845/jwk.v25i2.763>

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif* (3rd ed.). Alfabeta.

Sundari, M., Sumiati, N., & Syukrullah, M. (2023). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)*, 15(2), 145–156. <https://doi.org/10.37151/jsma.v15i2.129>

Tiurmaida, J., Murwaningsari, E., Simanjuntak, B., & Mayangsari, S. (2021). Determinant of Indonesia Government Financial Reporting Quality. *Journal of Business and Management Review*, 2(9), 595–604. <https://doi.org/10.47153/jbmr29.2192021>

Yasah, A. D., Ajuj, S. S., Fardani, L. K. A., Hidayat, R., & Ikaningtyas, M. (2024). KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS BERKELANJUTAN. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4). <https://doi.org/10.62281>